

**ANALISIS STAKEHOLDER PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL  
BANTIMURUNG BULUSARAUNG, PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
(*Stakeholder Analysis of Bantimurung Bulusaraung National Park Management,  
South Sulawesi Province*)

**Abd. Kadir W.<sup>\*</sup>, San Afri Awang<sup>\*\*</sup>, Ris Hadi Purwanto<sup>\*\*\*</sup> dan Erny  
Poedjirahajoe<sup>\*\*\*</sup>**

<sup>\*</sup>Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Sulawesi Selatan

<sup>\*\*</sup>Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>\*\*\*</sup>Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>\*</sup> Email: [abdКАДIRW@yahoo.com](mailto:abdКАДIRW@yahoo.com), [abd.КАДIRW@mail.ugm.ac.id](mailto:abd.КАДIRW@mail.ugm.ac.id)

Diterima: 7 Januari 2013

Disetujui: 13 Maret 2013

**Abstrak**

Para pihak (*stakeholder*) yang terkait dalam pengelolaan TN Babul memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam sehingga harus dapat dikelola dengan baik dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Babul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul, mendapatkan penjelasan tentang kepentingan dan pengaruh setiap *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul, serta peran *stakeholder* dalam mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar TN Babul.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maros pada Kawasan TN Babul, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada sejumlah informan kunci. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil analisis *stakeholder* menunjukkan bahwa *stakeholder* primer dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, Masyarakat sekitar TN Babul, PDAM Maros, Disparbud Maros, Lembaga Pengelola Air Desa. Sedangkan *stakeholder* sekunder terdiri dari Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, Pemerintah desa dan kecamatan, BP2KP Maros, BPN Maros, PNPM Mandiri, LSM, dan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian. Keberadaan *stakeholder* tersebut dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kawasan TN Babul. Peran yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik, bantuan teknis, dan dukungan penelitian. Pengelolaan kolaborasi dapat menjadi alternatif model pengelolaan TN Babul dalam mengakomodir kepentingan *stakeholder* yang beragam.

Kata Kunci: TN Babul, analisis stakeholder, pengelolaan kolaboratif

**Abstract**

*Stakeholders involved in management of the Babul National Park have diverse interest and power that must be managed well in achieving Babul National Park management objectives. This study aims to identify the stakeholders in Babul National Park management, an explanation of the interest and power of each stakeholder, and the role of stakeholders in accommodating the interests of communities around Babul National Park.*

*The research was conducted in Maros Regency in Babul National Park, South Sulawesi Province. Data collected through observation and interviews to a number key informants. Data were analyzed with qualitative descriptive analysis.*

*The results showed that primary stakeholders in the Babul National Park management consist of Babul National Park Agency, Communities around National Park, PDAM Maros, Tourism Office, water management institutions in the village. While the secondary stakeholders consist of the Forestry and Plantation Office, Agriculture Office, village and district government, Information and Food Security Agency, the National Land Agency, PNPM Mandiri, local NGOs, universities and research institutions*

*The existence of these stakeholders can provide positive and negative effects of Babul National Park. The role that can be done of stakeholders in accommodating the interests of society can be a control function, physical assistance, technical assistance, and research support. Collaborative management can be an alternative management model in accommodating the diverse interests of stakeholders.*

*Keywords: Babul National Park, Stakeholder Analysis, Collaborative Management.*

## PENDAHULUAN

### Latar Balakang

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 dengan luas kawasan yang mencapai 43.750 Ha. Secara administrasi pemerintahan kawasan TN Babul terletak di Kabupaten Maros, Pangkep dan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Kawasan TN Babul memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenis-jenis flora dan fauna endemik, unik dan langka; memiliki keunikan fenomena alam yang khas dan indah; serta ditujukan untuk perlindungan sistem tata air.

Potensi yang dimiliki kawasan TN Babul mengundang berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan potensi yang ada. Kepentingan berbagai pihak dalam memanfaatkan potensi sumberdaya alam dalam kawasan TN Babul cukup beragam, ada yang sejalan dan adapula yang bertentangan dengan tujuan konservasi. Untuk itu sangat penting mengenali pihak-pihak yang berkepentingan serta pengaruh yang mungkin ditimbulkan terhadap kawasan TN Babul dan bagaimana mengelola pihak-pihak tersebut menjadi kekuatan positif dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Babul.

Salah satu permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat sehubungan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tentang penunjukan kawasan TN Babul terkait pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dalam kawasan TN Babul. Masyarakat selama ini memanfaatkan SDA dalam kawasan TN Babul untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan bertani (sawah dan kebun), memungut hasil hutan

kayu dan hasil hutan bukan kayu (rotan dan nira aren). Kebun masyarakat dalam kawasan TN Babul umumnya ditanami dengan tanaman kemiri disamping tanaman semusim (jagung, lombok, kacang-kacangan) serta tanaman tahunan (kaka dan kopi).

Tanaman kemiri yang telah dikelola masyarakat secara turun-temurun dalam kawasan TN Babul khususnya masyarakat di Kabupaten Maros. Antara tahun 1960-an sampai 1980, hutan kemiri merupakan simbol status sosial dan menjadi primadona karena menjadi sumber pendapatan utama yang menyejahterakan masyarakat (Yusran, 2005). Saat ini hutan kemiri mengalami penurunan produktivitas yang disebabkan umur tegakan yang sudah tua (Hasnawir dan Yusran, 2000; Yusran, 2005, Alam, 2007). Saat ini masyarakat menginginkan adanya peremajaan kemiri dalam kawasan TN Babul. Untuk itu diperlukan keterlibatan para pihak terkait sehingga keinginan masyarakat tersebut dapat terwujud.

### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi para pihak terkait (*stakeholder*) dalam pengelolaan TN Babul; 2) Mendapatkan penjelasan mengenai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap (*stakeholder*) dalam pengelolaan TN Babul; 3) Merumuskan peran para pihak terkait (*stakeholder*) dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terkait peremajaan kemiri dalam kawasan TN Babul

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan model pengelolaan TN Babul yang efektif.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) di Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Nopember 2010.

### Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara (*interview*) terhadap sejumlah informan kunci. Kegiatan observasi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai para pihak terkait (*stakeholder*) dalam pengelolaan TN Babul. Sedangkan kegiatan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan mengenai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakeholder*, serta peran *stakeholder* dalam mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pengelolaan TN Babul. Pemilihan informan kunci dilakukan secara *purposive* yang didasarkan pada kepakaran dan pengetahuan yang dimiliki. Informan kunci dalam penelitian ini berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, aparat pemerintahan tingkat desa dan kecamatan, Staf Balai TN Babul, aparat dinas terkait (pemda), staf dosen perguruan tinggi, peneliti Balai Penelitian Kehutanan Makassar (BPK Makassar), dan anggota LSM.

### Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan TN Babul, kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul, dan menjelaskan peran *stakeholder* dalam mengakomodir kepentingan masyarakat terkait peremajaan kemiri dalam kawasan TN Babul.

Analisis deskriptif kualitatif juga digunakan dalam menjelaskan hasil

pemetaan *stakeholder* TN Babul yang didasarkan pada kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) *stakeholder* melalui teknik skoring dengan menggunakan skala Likert. Skoring dilakukan terhadap kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakeholder* dengan menggunakan 5 (lima) parameter yaitu kelestarian kawasan TN Babul, kebijakan (model) pengelolaan TN Babul, pemanfaatan Sumberdaya Alam Hutan (SDAH), partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sekitar TN Babul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Para Pihak Terkait (*Stakeholder*) dalam Pengelolaan TN Babul

Para pihak terkait atau yang lazim dikenal dengan istilah *stakeholder* oleh Freeman (1984) didefinisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) dari keputusan yang diambil. Sementara Salam and Noguchi (2006) mendefinisikan *stakeholder* sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan.

Hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah informan kunci diketahui bahwa *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul di Kabupaten Maros terdiri dari: 1) ; 2) Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul); 3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros (Dishutbun Maros); 4) Dinas Pertanian Kabupaten Maros; 5) PDAM Kabupaten Maros; 6) Pemerintah Desa dan Kecamatan; 7) PNPM Mandiri; 8) Masyarakat sekitar TN Babul; 9) Badan Pertanahan Nasional Maros (BPN Maros); 10) Lembaga pengelola air di desa; 11) Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Maros (Disparbud Maros); 12) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan

Pangan Kabupaten Maros (BP2KP Maros); 13) LSM lokal; 14) Perguruan Tinggi/lembaga penelitian

*Stakeholder* tersebut di atas dikelompokkan menjadi *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Menurut Townsley (1998), *stakeholder* primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian atau pihak yang terlibat langsung dalam eksploitasi. Sementara *stakeholder* sekunder adalah pihak yang memiliki minat/kepentingan secara tidak langsung, atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Townsley (1998) tersebut, maka yang termasuk *stakeholder* primer dalam pengelolaan TN Babul adalah:

Balai TN Babul. Sebagai pengelola kawasan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 sehingga sangat berkepentingan terhadap kelestarian kawasan TN Babul.

Masyarakat Sekitar TN Babul. Masyarakat sekitar berkepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang terdapat dalam TN Babul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

PDAM Maros. PDAM Maros berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang bersumber dari kawasan Taman Nasional dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Maros.

Disparbud Maros. Instansi ini berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan jasa wisata yang terdapat dalam kawasan TN Babul.

Lembaga Pengelola Air Desa. Mendapatkan manfaat dari pemanfaatan air yang bersumber dari kawasan TN Babul yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan *stakeholder* sekunder dalam pengelolaan TN Babul adalah :

Dishutbun Maros. *Stakeholder* ini berkepentingan terhadap keberhasilan pengelolaan hutan secara umum di Kabupaten Maros.

Dinas Pertanian Maros. *Stakeholder* ini

berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi hasil pertanian dan berpengaruh terhadap kelestarian kawasan TN Babul.

Pemerintah desa dan kecamatan. *Stakeholder* ini berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar TN Babul.

BP2KP Maros. *Stakeholder* ini berkepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan kapasitas petani dan hasil pertanian serta keberadaannya memiliki pengaruh terhadap kelestarian kawasan TN Babul.

BPN Maros. *Stakeholder* ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan TN Babul, tetapi dapat memberikan pengaruh positif terhadap pengelolaan TN Babul melalui pencegahan terjadinya sertifikasi lahan hutan menjadi hak milik.

PNPM Mandiri. *Stakeholder* ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan TN Babul, tetapi dapat memberikan pengaruh positif pengelolaan TN Babul melalui pengembangan hutan rakyat (HR).

LSM lokal. *Stakeholder* ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan TN Babul, tetapi dapat berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat.

Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian. *Stakeholder* ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan TN Babul, tetapi dapat berperan dalam memberikan dukungan penelitian yang aplikatif kepada masyarakat serta membantu mendorong pengelolaan TN Babul yang efektif.

Balai TN Babul selaku pengelola kawasan harus dapat mengelola *stakeholder* tersebut di atas dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Babul. The Clarkson Center for Business Ethics (1999) dalam Friedman and Miles (2006) mengemukakan tujuh prinsip dalam mengelola *stakeholder* yaitu:

Mengakui dan secara aktif memantau hal yang menjadi perhatian *stakeholder*, serta memperhatikan kepentingan mereka dalam pengambilan keputusan.

Mendengarkan dan berkomunikasi secara terbuka dengan *stakeholder* mengenai

hal yang menjadi perhatian dan kontribusinya, serta risiko yang mungkin terjadi akibat keterlibatannya.

Mengadopsi proses dan cara berperilaku terhadap hal sensitif yang menjadi perhatian dan kemampuan masing-masing *stakeholder*.

Mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara *stakeholder*, dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanan masing-masing.

Bekerja sama dengan entitas lain untuk memastikan bahwa risiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan serta kompensasi yang tepat.

Menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima *stakeholder*.

Mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggung jawab hukum dan moral bagi *stakeholder*, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, pelaporan yang

tepat, sistem insentif, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga.

### Pemetaan *Stakeholder* dalam Pengelolaan TN Babul

*Stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul memiliki kepentingan (*interest*) serta pengaruh (*power*) yang beragam, ada yang bersifat positif adapula yang bersifat negatif terhadap keberhasilan pengelolaan TN Babul sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) dari setiap *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul yang beragam perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan *stakeholder* akan membantu pengelola bagaimana melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pencapaian tujuan (Reed et. al, 2009). Hasil pemetaan *stakeholder* yang didasarkan skoring kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) setiap *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul disajikan pada Gambar 1.

Tabel 1. Matriks Analisis Kepentingan (*interest*) dan Pengaruh (*power*) *Stakeholder* dalam Pengelolaan TN Babul

<i>Stakeholder</i>	Kepentingan ( <i>interest</i> )	Pengaruh ( <i>power</i> ) terhadap TN Babul	Prioritas berdasarkan kepentingan
Balai TN Babul	Kelestarian kawasan TN Babul	+++	1
Masyarakat sekitar	Pemanfaatan SDAH untuk memenuhi kebutuhan hidup	+++ / ---	1
PDAM Maros	Peningkatan volume penjualan air dan pendapatan	+	4
Disparbud Maros	Peningkatan jumlah pengunjung dan pendapatan	++	2
Lembaga Pengelola Air Desa	Keberlangsungan pasokan air kerumah penduduk dan pendapatan	++	2
Dishutbun Maros	Keberhasilan pengelolaan hutan di Kabupaten Maros	++	2
Dinas Pertanian Maros	Peningkatan hasil pertanian masyarakat	++ / -	3
Pemerintah desa dan Kecamatan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar TN Babul	++	2
BP2KP Maros	Peningkatan kapasitas petani	++	3
BPN Maros	Pencegahan sertifikasi kawasan hutan	++	4
PNPM Mandiri	Pengembangan Hutan Rakyat	+	5
LSM	Peningkatan kapasitas masyarakat (advokasi)	++ / -	2
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Kelestarian kawasan TN Babul dan kesejahteraan masyarakat	++	1

Keterangan : +++ / --- = tinggi, ++ / -- = sedang, + / - = rendah

Berdasarkan hasil pemetaan *stakeholder* TN Babul sebagaimana disajikan pada Gambar 1, dapat disimpulkan sebagai berikut :

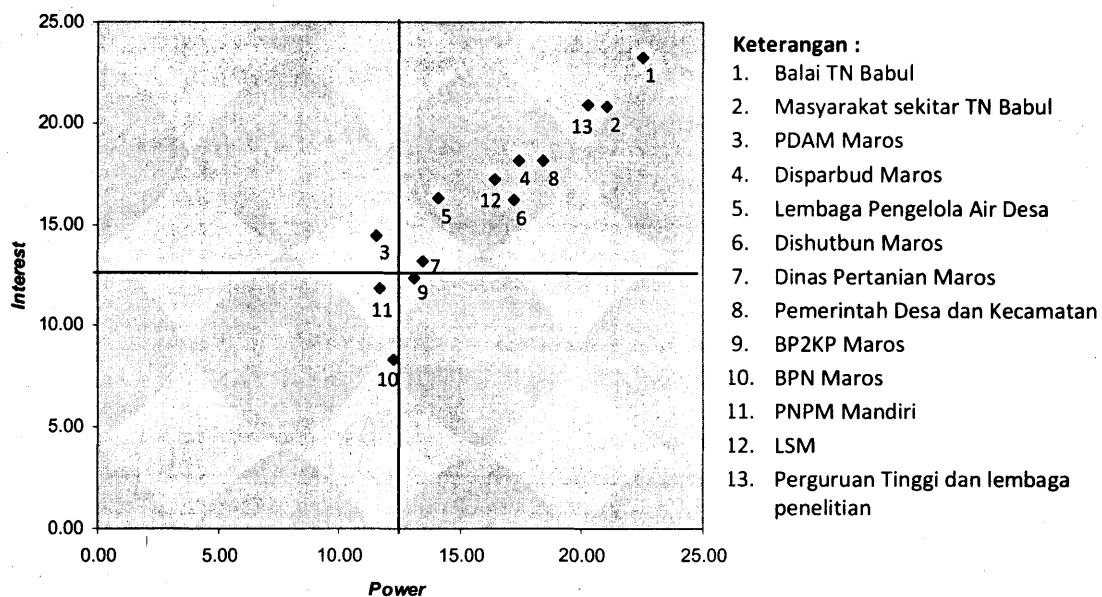
*Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang tinggi tetapi memiliki pengaruh (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai **Subjects** (Kotak A). *Stakeholder* ini memiliki kapasitas yang rendah dalam pencapaian tujuan, akan tetapi dapat menjadi berpengaruh dengan membentuk aliansi dengan *stakeholder* lainnya (Reed et al, 2009). *Stakeholder* ini sering bisa sangat membantu sehingga hubungan dengan *stakeholder* ini harus tetap dijaga dengan baik (Thompson, 2011; Gardner et al, 1986) dan sedapat mungkin dapat berkontribusi sesuai dengan kepentingan/manfaat yang diperoleh. *Stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai *subjects* dalam penelitian ini adalah PDAM Maros.

*Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai **Key Players** (Kotak B). *Stakeholder* ini harus lebih aktif

dilibatkan secara penuh (Reed et al, 2009; Thompson, 2011) termasuk dalam mengevaluasi strategi baru (Gardner et al, 1986). *Stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai *key players* dalam penelitian ini adalah Balai TN Babul, masyarakat sekitar TN Babul, Disparbud Maros, Lembaga Pengelola Air Desa, Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, Pemerintah desa dan kecamatan, LSM, dan Perguruan Tinggi/lembaga penelitian.

*Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) yang rendah diklasifikasikan sebagai **Crowd** (Kotak C). Diperlukan sedikit dipertimbangkan untuk melibatkan *stakeholder* ini lebih jauh karena kepentingan dan pengaruh yang dimiliki biasanya berubah seiring berjalannya waktu (Reed et al, 2009). *Stakeholder* ini harus tetap dimonitor dan dijalin komunikasi dengan baik (Thompson, 2011; Gardner et al, 1986). *Stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai *crowd* dalam penelitian ini adalah BPN Maros dan PNPM Mandiri.

*Stakeholder* dengan tingkat kepentingan (*interest*) yang rendah tetapi memiliki



Gambar 1. Pemetaan *Stakeholder* Berdasarkan Kepentingan (*interest*) dan Pengaruhnya (*power*) dalam Pengelolaan TN Babul

pengaruh (*power*) yang tinggi diklasifikasikan sebagai *Context setters* (Kotak D). *Stakeholder* ini dapat mendatangkan resiko sehingga keberadaannya perlu dipantau dan dikelola dengan baik (Reed et al, 2009). *Stakeholder* ini relatif pasif, akan tetapi dapat berubah menjadi *key palyers* karena suatu peristiwa (Gardner et al, 1986). Hubungan baik dengan *stakeholder* ini terus dibina. Untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan aktif dalam pencapaian tujuan (Thompson, 2011). *Stakeholder* yang diklasifikasikan sebagai *context setters* dalam penelitian ini adalah BP2KP Maros.

### C. Peran Para Pihak (*Stakeholder*) dalam Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat sekitar TN Babul

Sebagaimana dijelaskan pada bagian latar belakang bahwa masyarakat sekitar TN Babul menginginkan peremajaan tanaman kemiri (*Alleurites moluccana*) yang telah dikembangkan secara turun temurun dalam kawasan TN Babul.

Kondisi hutan kemiri yang terdapat dalam kawasan TN sudah tua (diperkirakan berumur  $\pm$  65 tahun) dan mengalami penurunan produksi. Menurut Elevitch and Manner (2006) tanaman kemiri diperkirakan dapat hidup antara 40–60 tahun. Artinya tanaman kemiri tersebut sudah sepatasnya diremajakan.

Permasalahannya adalah jika peremajaan tegakan kemiri tidak dilakukan maka masyarakat sekitar akan kehilangan salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Praktek peremajaan tegakan kemiri yang dilakukan oleh masyarakat praktis melibatkan kegiatan penebangan, dan pembakaran lahan dengan alasan untuk memudahkan proses pengolahan tanah dan mempercepat proses pertumbuhan anakan kemiri. Sementara pihak pengelola Taman Nasional (Balai TN Babul) mengkhawatirkan kegiatan peremajaan hutan kemiri tersebut akan merusak fungsi ekologi kawasan atau bahkan dikonversi menjadi kebun (kebun kakao dan kopi) dan ladang.

Menghadapi permasalahan tersebut di atas, diperlukan keterlibatan para pihak terkait (*stakeholder*) dengan segala potensi yang dimilikinya. Beberapa *stakeholder* yang dapat terlibat diantaranya adalah Balai TN Babul, masyarakat sekitar TN Babul, Pemerintah desa dan kecamatan, Dishutbun Maros, BP2KP Maros, Dinas Pertanian Maros, PNPM Mandiri, LSM setempat, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian.

Beberapa peran yang dapat dilakukan oleh *stakeholder* tersebut dalam mengakomodasi keinginan peremajaan tegakan kemiri dalam kawasan TN Babul diantaranya:

Balai TN Babul. Sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya yaitu melakukan pengelolaan TN Babul dengan sistem zonasi. Tegakan kemiri yang dikelola oleh masyarakat dalam kawasan TN Babul umumnya masuk dalam zona tradisional. Hal yang perlu diatur dan disepakati bersama adalah bagaimana mekanisme peremajaan kemiri dalam zona tradisional tersebut, bagaimana sistem pengawasannya, lembaga apa saja yang terlibat, sanksi atas pelanggaran kesepakatan tersebut.

Masyarakat sekitar. Melakukan kegiatan peremajaan kemiri berdasarkan kesepakatan yang ada, serta menjaga keamanan kawasan TN Babul dari pihak-pihak yang akan melakukan pengrusakan kawasan tersebut.

Pemerintah desa dan kecamatan. Melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan kesepakatan antara masyarakat dan Balai TN Babul dalam peremajaan kemiri.

Dishutbun Maros. Penyediaan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan (termasuk kemiri) yang akan dikembangkan oleh masyarakat dalam kawasan TN Babul, pengembangan hutan rakyat (HR) untuk tingkat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul.

BP2KP Maros. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas petani melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan serta pengembangan kelompok tani.

Dinas Pertanian Maros. Penyediaan bibit tanaman pertanian yang berkualitas, bimbingan teknis dalam meningkatkan produktivitas tanaman pertanian di luar kawasan TN Babul untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul.

LSM lokal. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan sehingga lebih mandiri, pemberian bimbingan teknis seperti pembuatan kompos atau bokasi, dan pembuatan biogas sebagai sumber energi/bahan bakar bagi masyarakat sekitar TN Babul.

PNPM Mandiri. Penyediaan bibit tanaman kehutanan dan perkebunan melalui program PNPM Mandiri bidang penghijauan untuk memenuhi kebutuhan kayu masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar TN Babul.

Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian. Memberikan dukungan penelitian sehingga kegiatan peremajaan tanaman kemiri memiliki landasan ilmiah.

Keberadaan *stakeholder* dengan segala peran yang dapat dilakukan serta potensi yang dimilikinya menjadi modal tersendiri bagi pengelola kawasan TN Babul. Kolaborasi dengan *stakeholder* tersebut di atas dapat menjadi kunci sukses dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan berkolaborasi maka keterbatasan yang dimiliki oleh pengelola TN Babul seperti keterbatasan dana, sarana dan prasarana, serta keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia dapat diatasi.

### Menuju Pengelolaan TN Babul Kolaboratif

Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud (Friedman and Miles, 2006). Untuk itu diperlukan suatu model pengelolaan yang dapat mengakomodir semua kepentingan *stakeholder* dengan memperhatikan potensi dan peran yang dapat dilakukan dalam pengelolaan TN Babul. Pengelolaan kolaborasi atau yang

lazim dikenal dengan istilah *co-management* atau *collaborative management* menjadi salah satu alternatif dalam mengakomodasi kepentingan, potensi, dan peran *stakeholder* (Borrini-Feyerabend et al, 2000; Tadjudin, 2000; Awang et al, 2005) dalam pengelolaan TN Babul.

Beberapa prinsip dan nilai-nilai utama dalam pengelolaan kolaborasi antara lain (Awang et al, 2005):

Mengakui adanya perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan kepedulian dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Terbuka terhadap kemungkinan hadirnya ragam tipe-tipe pengelolaan sumberdaya hutan diluar sesuatu yang sudah dikenal dan ditetapkan dalam peraturan formal.

Keterbukaan dan pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Memungkinkan masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih penting dan bertanggung jawab.

Menghormati suatu proses sebagai hal yang penting dibandingkan orientasi hasil-hasil dalam waktu singkat.

Belajar dan bekerja melalui revisi-revisi kegiatan yang sedang berjalan dan meningkatkannya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Marshall (1995) menyebutkan tujuh nilai dalam berkolaborasi yaitu (1) menghormati orang lain, (2) memiliki kehormatan dan integritas, (3) kejelasan hak dan aturan main, (4) adanya konsensus, (5) hubungan yang berbasis kepercayaan, (6) tanggung jawab dan keterbukaan, dan (7) pengakuan dan pertumbuhan. Jusuf et al. (2010) menyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan baik adalah:

- 1) Memerlukan kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan;
- 2) Menciptakan ruang kolaborasi bagi masyarakat lokal;
- 3) Harus beradaptasi terhadap perubahan sehingga perlu ada ruang untuk negosiasi ulang dalam mengatasi perubahan yang terjadi.

Dalam manajemen kolaboratif, kebijakan ataupun keputusan yang diambil sedapat-mungkin dibangun dari hasil kesepakatan para pihak yang terlibat. Salah satu model



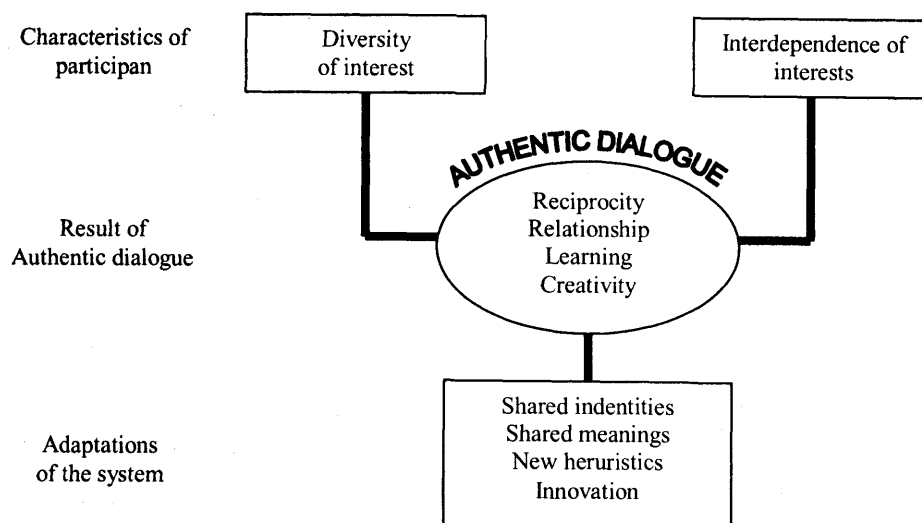
penyusunan kebijakan yang dapat ditempuh adalah model kebijakan deliberatif. Model deliberatif memusatkan diri pada prosedur untuk menghasilkan suatu kebijakan (Hardiman, 2009). Dalam kebijakan deliberatif harus terjadi *authentic dialogue* (dialog autentik) yang didasarkan pada kesadaran terhadap karakteristik peserta yang memiliki beragam kepentingan dan terdapat hubungan saling ketergantungan diantara kepentingan yang beragam tersebut (Innes and Booher, 2003). Proses penyusunan kebijakan deliberatif disajikan pada Gambar 2.

Innes and Booher (2003) menjelaskan bahwa dalam proses dialog autentik akan terjadi:

1) Pertukaran (*reciprocity*) yaitu sebuah kesepakatan yang adil antar peserta sehingga apa yang mereka peroleh seimbang dengan apa yang mereka berikan; 2) Hubungan yang baik (*relationships*) yaitu bentuk hubungan baru antara peserta yang menjadi modal sosial bagi keberlangsungan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama; 3) Pembelajaran (*learning*) yaitu suatu proses

di mana peserta tidak hanya mendengarkan dan menjawab pertanyaan, tetapi juga mengungkapkan pendapat dan skenario pemecahan masalah; 4) Kreativitas (*creativity*) diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan suatu solusi yang dapat dikerjakan dalam suatu diskusi.

Dialog autentik diharapkan akan menghasilkan empat perubahan. Pertama, perubahan identitas bersama (*shared identities*) yaitu terjadinya penggabungan identitas individu menjadi identitas bersama sebagai pemangku kepentingan. Kedua, perubahan makna bersama (*share meanings*), yaitu sebuah makna baru bersama yang lebih mudah untuk dipahami oleh pemangku kepentingan. Ketiga, sebuah heuristik baru (*new heuristics*) yaitu kemauan untuk mendengarkan orang lain, memperlakukan orang lain secara hormat, dan lebih mencari kesamaan dari pada perbedaan kepentingan. Keempat, lahirnya inovasi asli (*genuine innovation*), yaitu kreatifitas yang dapat diwujudkan dalam praktek dan institusi baru (Innes and Booher, 2003).



Gambar 1. Pemetaan *Stakeholder* Berdasarkan Kepentingan (*interest*) dan Pengaruhnya (*power*) dalam Pengelolaan TN Babul

## KESIMPULAN

*Stakeholder* primer dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, Masyarakat sekitar TN Babul, PDAM Maros, Disparbud Maros, dan Lembaga Pengelola Air Desa. Sedangkan *stakeholder* sekunder terdiri dari Dishutbun Maros, Dinas Pertanian Maros, BP2KP Maros, BPN Maros, PNPM Mandiri, LSM, dan Perguruan Tinggi dan lembaga penelitian.

Kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul terdiri dari kepentingan untuk menjaga kelestarian kawasan, dan kepentingan untuk memperoleh manfaat atas keberadaan Taman Nasional seperti pemanfaatan jasa air untuk kebutuhan sehari-hari dan wisata, serta sebagai tempat untuk berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara keberadaan *stakeholder* tersebut dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap kelestarian kawasan TN Babul.

*Stakeholder* yang dapat terlibat dalam menyelesaikan permasalahan terkait keinginan peremajaan tegakan kemiri dalam kawasan TN Babul terdiri dari Balai TN Babul, Masyarakat sekitar TN Babul, Dishutbun Maros, BP2KP Maros, Dinas Pertanian Maros, PNPM Mandiri, LSM, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga penelitian. Sementara peran-peran yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini dapat berupa fungsi kontrol, bantuan fisik (bibit tanaman), bantuan teknis (teknik pengolahan lahan, penyuluhan, pelatihan dan pendampingan), serta dukungan penelitian kebijakan pengelolaan TN Babul.

## SARAN

Pengelola kawasan TN Babul (Balai TN Babul) harus dapat mengelola berbagai kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) *stakeholder* yang beragam dan sedapat mungkin memanfaatkan potensi yang terdapat pada setiap *stakeholder* dalam mencapai tujuan pengelolaan TN Babul.

Model pengelolaan kolaborasi dapat

menjadi alternatif untuk diterapkan dalam mengelola TN Babul sehingga terjadi pemerataan distribusi manfaat dan tanggung jawab secara adil kepada semua *stakeholder*.

Proses pengambilan keputusan yang akan berdampak kepada kepentingan *stakeholder* sedapat mungkin mengikuti model kebijakan deliberatif sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi dan dapat diterima oleh setiap *stakeholder* dalam pengelolaan TN Babul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. 2007. Nilai Manfaat dan Pola Konversi Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Desertasi (tidak dipublikasikan). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Awang, S.A, A. Kasim, B. Tular dan N. Salam, 2005. Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. CARE International Indonesia Southeast Sulawesi. Kendari.
- Borrini-Feyerabend, Grazia, M.Tagvi Farvar, Jean Claude Nguingui and Vincent Awa Adangang. 2000. Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating, and Learning-by-Doing. GTZ and IUCN.
- Bungin, B. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Elevitch, C.R. and Manner, H.I. 2006. *Aleurites moluccana* (kukui). Species Profiles for Pacific Island Agroforestry. Traditional Tree Initiative. ([www.traditionaltree.org](http://www.traditionaltree.org)). Akses Tgl. 19 Pebruari 2011.
- Freeman, R.Edward. 1984. Strategic Management. A Stakeholder Approach. University of Minnesota.
- Friedman, A.L. and S. Miles. 2006. Stakeholders. Theory and Practice. OXFORD University Press.
- Gardner, J.R., Rachlin, R. and Sweeny,

- H.W.A. 1986. Handbook of Strategic Planning. [http://www.12manage.com/methods\\_stakeholder\\_mapping.html](http://www.12manage.com/methods_stakeholder_mapping.html). Akses Tgl. 23 Juli 2011.
- Hardiman, B.F., 2009. Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Kanisius. Yogyakarta
- Hasnawir dan Yusran. 2000. Analisis Model Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Buletin Penelitian Kehutanan Volume 6 Nomor 1. Balai Penelitian Kehutanan Ujung Pandang. Makassar.
- Innes, J.E. and Booher, D.E. 2003. Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue. in *Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society*. Edited by Hajer, M.A. and Wagenaar, H.. Cambridge University Press.
- Jusuf, Y., Supratman, dan Alif KS, M. 2010. Pendekatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat. Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02. The Center for People and Forest. RECOFTC.
- Marshall, E.M. 1995. *Transforming the Way We Work. The Power of Collaborative Workplace*. American Management Association. New York.
- Reed, M.S, A. Graves, N. Dandy, H. Posthumus, K. Hubacek, J. Morris, C. Prell, C.H. Quinn, L.C. Stringer. 2009. *Who's In And Why? A Typology Of Stakeholder Analysis Methods For Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management 90 (2009) 1933–1949. Elsevier.
- Salam, Md. Abdus and T. Noguchi. 2006. Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics* 8 (2006) 785–796. doi:10.1016/j.forpol.2004.12.004. ScienceDirect.
- Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor.
- Thompson, R. 2011. Stakeholder Analysis. Winning Support for Your Projects. [http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM\\_07.htm](http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm). Akses Tanggal 20 Pebruari 2011.
- Townsley, P. 1998. Social Issues in Fisheries. *FAO Fisheries Technical Paper*. No. 375. Rome, FAO. 1998. 39p. FAO CORPORATE DOCUMENT REPOSITORY. <http://www.fao.org/DOCREP/003/W8623E/w8623e05.htm>. Akses Tanggal 23 Juli 2011.
- Yusran, 2005. Mengembalikan Kejayaan Hutan Kemiri Rakyat. Governance Brief. Juni 2005 Nomor 10. CIFOR. Bogor.